



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ERWIN SITUMORANG
2. Jabatan : KEPALA KANTOR
3. NHK : 267905

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.750.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 171 m2/180 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.450.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/72 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000		
3. Bangunan Seluas 21 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	722.500.000
1. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2000, WARISAN Rp. 2.500.000		
2. MOTOR, YAMAHA X MAX 250 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 42.000.000		
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000		
4. MOBIL, MAZDA 6 WAGON Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 358.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	274.100.000
D. SURAT BERTAHAPAN	Rp.	205.863.463
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	208.108.414
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.160.571.877
III. HUTANG	Rp.	----



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

4.160.571.877

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.